

Laporan Tahunan 2007

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN



**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2008**





LAPORAN TAHUNAN 2007

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Penanggungjawab : Muhrizal Sarwani
(Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian)

Tim Penyusun : Yovita Anggita D
Vyta W. Hanifah
Ketut Kariyasa
Sudi Mardianto
Erizal Jamal
Achmad Subaidi



BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Jalan : Tentara Pelajar 10 Cimanggu Bogor
Telp. : (0251) 8351277
Fax : (0251) 8350928
Email : bp2tp@yahoo.com/bbp2tp@yahoo.com
Http : www.bbp2tp.litbang.deptan.go.id

KATA PENGANTAR

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian merupakan salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian yang mempunyai mandat untuk mengkoordinasikan BPTP dalam melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi. BBP2TP beserta BPTP menjadi ujung tombak Badan Litbang Pertanian dalam penyaluran inovasi pertanian hasil-hasil Litbang kepada berbagai *stakeholder* di daerah.

Tugas strategis ini menuntut sistem manajemen yang solid, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporannya. Upaya peningkatan dan perbaikan kinerja perlu terus dilakukan. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan referensi untuk perbaikan kinerja institusi dimasa datang.

Laporan ini berisi tentang: visi dan misi BBP2TP, program dan kegiatan, intisari kegiatan utama dan kegiatan penunjang, evaluasi diri, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Selama pelaksanaan kegiatan BBP2TP pada kurun waktu 2007, tentunya telah banyak hal-hal yang dicapai yang dalam pelaksanaannya tidak luput dari berbagai tantangan, hambatan, dan kendala yang perlu mendapatkan perhatian dan diupayakan mencari solusi yang terbaik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. Harapan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya perbaikan kinerja BBP2TP ke depan.

Bogor, Januari 2008

Kepala Balai Besar
Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian,

Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc
NIP. 080 069 528

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. PROGRAM DAN KEGIATAN	2
III. EVALUASI TERHADAP KINERJA KEGIATAN	3
3.1. Evaluasi terhadap Fungsi Koordinasi BBP2TP dalam Pelaksanaan Pengkajian	3
3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan	6
IV. HASIL KEGIATAN	8
V. SUMBERDAYA MANUSIA	20
VI. SARANA DAN PRASARANA	22
6.1. Barang Tidak Bergerak	22
6.2. Barang Bergerak	22
VII. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	24
VIII. PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Program Utama dan Kegiatan BBP2TP TA 2007	2
Tabel 3.1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkup BBP2TP Tahun 2007.....	4
Tabel 3.2. Uraian Kegiatan Kerjasama yang Dilakukan BPTP pada Berbagai Level Kerjasama TA. 2007	5
Tabel 6.1. Rekapitulasi Barang Inventaris Tidak Bergerak BBP2TP TA. 2007	22
Tabel 6.2. Keragaan Barang Inventaris Bergerak Alat Angkutan, 2007...	23
Tabel 7.1. Realisasi Anggaran BBP2TP Tahun 2007 Berdasarkan Belanja, 2007	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi DIPA Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian T A. 2007	25
---	----

I. PENDAHULUAN

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi BBP2TP adalah : (a) Perumusan program dan evaluasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (b) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (c) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, (d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi unggulan, (e) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi pertanian regional dan nasional, dan (f) Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Selain tugas pokok fungsi diatas BBP2TP juga diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilaksanakan di 31 BPTP dan 1 satker PTP, serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian. Pemberian mandat BBP2TP untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP, terkait erat dengan tekad Badan Litbang Pertanian untuk mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Fungsi koordinasi yang terkait dengan kegiatan pengkajian dan diseminasi dilaksanakan BBP2TP dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian. BBP2TP juga melaksanakan fungsi koordinasi terkait dengan pembinaan sumber daya dan publikasi hasil-hasil penelitian/pengkajian BPTP.

Karena luasnya rentang kendali dan cakupan kegiatan yang harus dikoordinasikan, maka porsi terbesar kegiatan BBP2TP adalah menjalankan fungsi koordinasi (80%), dan dalam pelaksanaannya sehari-hari BBP2TP dibantu oleh beberapa Tim *ad hoc* seperti Tim Teknis Pengembangan dan Tim Teknis Pusat Prima Tani.

Penulisan Laporan ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban BBP2TP terhadap publik atas apa yang sudah dikerjakan dan dihasilkan sala setahun terakhir. Selain itu Laporan ini juga menjadi media untuk mengukur kinerja lembaga dan acuan bagi perencanaan kegiatan ke depan.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Pertanian serta tugas, fungsi, mandat serta visi dan misi yang telah ditetapkan, BBP2TP menetapkan empat program utama yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai kegiatan (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Program Utama dan Kegiatan BBP2TP TA. 2007

Program	Kegiatan
Program penelitian dan pengkajian teknologi spesifik lokasi	- Kajian Pembangunan Wilayah Pedesaan - Pengkajian, Pendampingan, dan Monitoring Kelembagaan Keuangan Mikro - Rancang Bangun Pembangunan Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program pengembangan model agribisnis berbasis inovasi pertanian	- Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) - Kajian Kritis Prima Tani: Konsep dan Implementasi
Program pengembangan kapasitas kelembagaan Litbang Pertanian	- Peningkatan Kapasitas Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian - Peningkatan Kapasitas Manajemen SDM, Fasilitas dan Sarana
Program pengembangan sumberdaya informasi, komunikasi, diseminasi, dan penjangkaran umpan balik iptek	- Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian - Kajian Dampak Kegiatan Diseminasi Inovasi Luaran BPTP

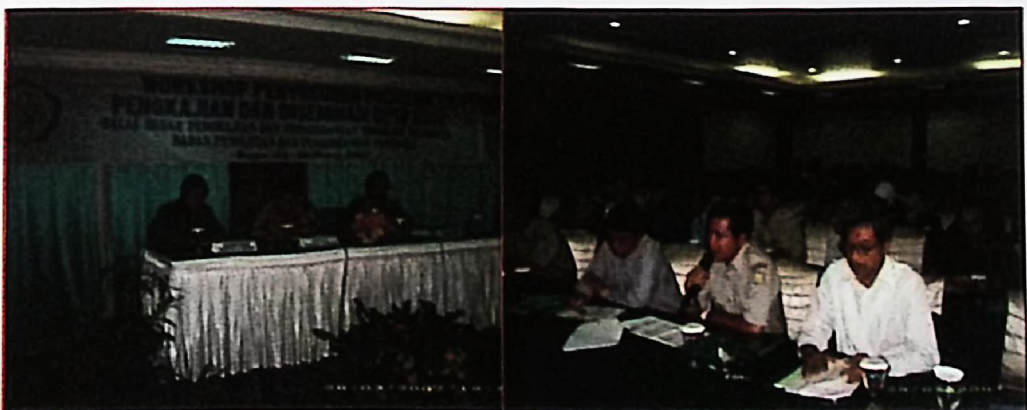
III. EVALUASI TERHADAP KINERJA KEGIATAN

Struktur organisasi BBP2TP yang pipih dan ramping berkedudukan sebagai Eselon II B, selain Tupoksinya melakukan pengkajian, juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada BPTP yang tersebar di 32 propinsi. Hal yang demikian menuntut strategi khusus untuk operasional kegiatannya, dengan mengoptimalkan SDM yang ada di BBP2TP dan melibatkan pula SDM yang ada di lingkup Badan Litbang Lainnya. Hal ini diimplementasikan dengan dibentuknya tim ad hoc seperti Tim Teknis Pengembangan, Teknis Prima Tani, Dewan Redaksi Jurnal Pengkajian yang melibatkan peneliti-peneliti senior Badan Litbang diluar BBP2TP. Hasil evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2007 meliputi:

3.1. Evaluasi terhadap Fungsi Koordinasi BBP2TP dan Pelaksanaan Pengkajian

Fungsi Koordinasi Program dan Evaluasi

Tahapan kegiatan penyusunan program pengkajian, baik untuk BBP2TP maupun BPTP, berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Litbang Pertanian. Penajaman terhadap usulan kegiatan BPTP untuk TA. 2008 yang dibantu Tim Teknis Pengembangan juga telah dilaksanakan dengan baik. Proses penajaman usulan kegiatan dilakukan melalui evaluasi matrik program dan pendampingan penyusunan matrik program. Matrik kegiatan yang telah diperbaiki diusulkan ke Badan Litbang Pertanian sebagai usulan kegiatan BBP2TP untuk dibahas pada tingkat Badan Litbang.



Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi, BBP2TP bersama dengan Tim Teknis Pengembangan telah menyempurnakan Panduan Umum Pengkajian dan Diseminasi Inovasi Pertanian, Monitoring, dan Evaluasi BPTP. Penyempurnaan panduan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, terutama terkait dengan fungsi monitoring kegiatan baik intern BBP2TP dan BPTP, sehingga pelaksanaan kegiatan ini masih perlu lebih ditingkatkan. Selain kendala waktu, adanya kebijakan pemotongan anggaran pada pertengahan tahun anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu, mulai awal tahun 2008 dilakukan perbaikan terhadap fungsi pelaksanaan monev, baik internal BBP2TP maupun BPTP, serta memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Fungsi Koordinasi Administrasi Kepegawaian dan Aset

Luasnya rentang kendali dan banyaknya SDM yang harus dikelola, membutuhkan strategi khusus untuk menanganinya. Hasil evaluasi menunjukkan masih perlu dilakukan berbagai penyempurnaan terkait dengan koordinasi fungsi administrasi kepegawaian, sehingga pelayanan terhadap stakeholder dapat lebih lancar, demikian pula dalam penataan aset, sarana, dan fasilitas pemanfaatannya dapat lebih efektif dan efisien. Penanganan fungsi administrasi kepegawaian selama tahun 2007 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pengelolaan Adiminstrasi Kepegawaian di Lingkup BBP2TP Tahun 2007

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengangkatan tenaga honorer	340
2.	Penetapan Angka Kredit (PAK) LIPI	121
3.	PAK impasing LIPI	614
4.	SK kenaikan pangkat fungsional peneliti	75
5.	SK Kenaikan pangkat pegawai	212
6.	Proses mutasi pegawai	83
7.	Pegawai Satmingkal yang disetujui dari 704 orang	184

Fungsi Koordinasi Kegiatan Kerja Sama

Fungsi koordinasi kegiatan kerja sama pada tahun 2007 telah berjalan dengan baik. Di samping menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dalam dan luar negeri, kegiatan kerja sama pada tahun 2007 difokuskan pada upaya pembenahan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh BPTP. Kinerja fungsi koordinasi kerja sama pada TA. 2007 dapat dilihat dari kerja sama dalam dan luar negeri (Tabel 3.2).

Tabel 3. 2. Uraian Kegiatan Kerjasama yang Dilakukan BPTP pada Berbagai Level Kerjasama TA. 2007

No.	Level Kerja sama	Uraian Kegiatan yang dikerjasamakan
1.	Dalam Negeri	(1) Penelitian, perekayasa, pengkajian, dan pengembangan dalam bidang pertanian, dengan berbagai mitra seperti instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, swasta, koperasi, kelompok tani, LSM dan lain-lain (2) Pemanfaatan aset BPTP seperti Mess, Kebun Percobaan, Laboratorium di tujuh BPTP, yaitu Kaltim, Sulut, Banten, Jabar, NTB, Kalsel, dan Sumbar
2.	Luar Negeri	(1) <i>Rice Check Project</i> , kerja sama dengan <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO). Periode implementasi selama 22 bulan (Nopember 2005 – Agustus 2007) di empat BPTP, yaitu di Sumbar, Lampung, Banten, dan NTB dengan.BBP2TP sebagai Koordinator (2) <i>Smallholder Agribusiness Development Initiative</i> (SADI), merupakan kerja sama dengan ACIAR dalam kegiatan pengkajian adaptif, diseminasi dan peningkatan kapasitas lembaga, phase I dimulai pada Agustus 2007 sampai dengan Desember 2011. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu di BPTP NTB, NTT, Sulsel dan Sultra (3) <i>Resource Exchange International Inc</i> (REI), merupakan kegiatan pengkajian pada usaha Pengeringan Mangga (4) <i>Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information</i> (FEATI), kerja sama antara Badan Litbang Pertanian dengan World Bank, dirancang selama kurun waktu 5 tahun (2007 – 2011), dilaksanakan di 18 provinsi (Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Banten, Jabar, Jatim, DIY, Jateng, NTB, NTT, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sultra, Sulut, Sulteng, dan Gorontalo). BPTP melaksanakan kegiatan ini bersama Bakorluh dan Bapepuh serta dikoordinasikan BBP2TP

Hasil evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh BPTP menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam tertib administrasi pelaporan kegiatan kerjasama, serta sinergi kegiatan kerjasama dengan kegiatan lain di BPTP. Untuk itu perlu dilakukan penertiban tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama dan sistim pelaporannya. Diterbitkannya buku panduan kerjasama oleh Badan Litbang Pertanian, diharapkan dapat membantu BBP2TP dalam mengkoordinasikan kegiatan kerjasama di BPTP.

Kegiatan Pengkajian

Kegiatan pengkajian yang dilakukan BBP2TP pada tahun 2007, yaitu: (1) Kajian Pembangunan Wilayah Pedesaan, (2) Pengkajian, Pendampingan, dan Monitoring Kelembagaan Keuangan Mikro, (3) Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian, (4) Program Rintisan dan Akselerasi Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian, dan (5) Kajian Dampak Kegiatan Diseminasi Inovasi Luaran BPTP. Keenam kegiatan tersebut secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik dan beberapa hasilnya, khususnya yang terkait dengan Analisis Kebijakan, telah dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dilingkup Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan pertanian di daerah.

Di samping melaksanakan kegiatan pengkajian di atas, BBP2TP juga mendapat mandat sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Prima Tani di 201 lokasi yang meliputi 33 provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan koordinasi kegiatan Prima Tani dapat berjalan dengan baik, selain karena terjalannya koordinasi antar seluruh instansi lingkup Departemen Pertanian, juga karena dukungan dan kerjasama Tim Teknis Prima Tani.

3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Dari gambaran kinerja di atas, terlihat bahwa selama TA. 2007 BBP2TP dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, namun demikian masih perlu dilakukan pembenahan dan optimalisasi kinerja, khususnya yang menyangkut fungsi koordinasi. Beberapa permasalahan yang perlu dapat perhatian antara lain: (a) Masih terbatasnya kemampuan staf penunjang untuk mendukung tupoksi BBP2TP yang cukup besar; (b) Sinergi kegiatan antar bagian/bidang masih belum berjalan seperti yang diharapkan; dan (c) Implementasi kegiatan tidak dapat terlaksana secara

tuntas akibat adanya pemotongan anggaran perjalanan dinas pada pertengahan tahun 2007 sebesar 70%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dan akan terus berjalan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: (a) Penambahan staf baru hasil seleksi ujian umum dengan kualifikasi pendidikan yang cukup memadai; (b) Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; serta (c) Sinkronisasi dan sinergi kegiatan antar bagian/bidang melalui pembahasan rencana kegiatan dalam forum rapat kerja dan pertemuan rutin bulanan; dan (d) Penertiban dan pengawasan secara cermat terhadap dokumen rencana dan implementasi kegiatan, termasuk pelaporannya.

IV. HASIL KEGIATAN

Beberapa hasil kegiatan pengkajian yang dilakukan BBP2TP selama tahun 2007, disarikan dalam bagian berikut :

4.1 Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani)

Pada tahun 2007, Prima Tani dilaksanakan di 201 lokasi yang meliputi 200 kabupaten/kota di 33 provinsi. Berdasarkan agroekosistem, lokasi Prima Tani dikategorikan dalam tiga agroekosistem utama dan delapan sub-agroekosistem. Dari 201 desa Prima Tani tersebut, 64 desa beragroekosistem lahan sawah (LS), 119 desa di lahan kering (LK), dan 18 lokasi di lahan pasang surut (LPS).

Kegiatan sinkronisasi dilaksanakan melalui pertemuan, pembahasan, koordinasi, diantaranya yaitu: (1) Penyusunan dan penyempurnaan petunjuk teknis, (2) Pendampingan PRA dan penajaman rancang bangun laboratorium agribisnis, (3) Pendampingan penyusunan perencanaan program TA. 2008, (4) Sosialisasi Prima Tani, (5) Rapat koordinasi, (6) Monitoring dan evaluasi, serta (7) Pengembangan database dan website Prima Tani.

Penyempurnaan pedoman, panduan, dan petunjuk pelaksanaan dilakukan didasarkan pada dinamika kebijakan dan pelaksanaan Prima Tani di lapangan. Penyempurnaan dilakukan terhadap beberapa buku, yaitu: (1) Petunjuk Umum Perancangan Laboratorium Agribisnis, (2) Petunjuk Teknis (Juknis) PRA, (3) Juknis Survei Pendasaran, (4) Panduan Monitoring dan Evaluasi, dan (5) Pedoman Umum. Penyempurnaan substansi Pedoman Umum Prima Tani terutama terkait dengan penyempurnaan makna SUID-AIP, uraian tugas Pemandu Teknologi, dan penambahan bab baru, yaitu Integrasi Program Pembangunan.

Terkait dengan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dilaksanakan Departemen Pertanian mulai tahun 2008 (201 Lokasi Prima Tani direncanakan menjadi bagian dari lokasi PUAP), perlu strategi koordinasi dan sinkronisasi implementasi program PUAP di lokasi Prima Tani.

Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Prima Tani dilakukan melalui beberapa kemas, yaitu: (1) Workshop pemantapan Prima Tani 2005 dan 2006 dan penajaman rancang bangun laboratorium agribisnis di lokasi

Prima Tani 2007, (2) Monev lapang yang dilakukan pada sebagian lokasi, dan (3) Monev akhir tahun yang dikemas dalam bentuk workshop evaluasi.

iKinerja Prima Tani selama tiga tahun berjalan (pada beberapa lokasi) telah mampu mempercepat penyampaian inovasi pertanian kepada pengguna dan di sebagian besar lokasi telah mampu menghubungkan Badan Litbang Pertanian dengan lembaga-lembaga Pelayan Pendukung Agribisnis (Badan/Dinas/Instansi Teknis, Lembaga Penyuluhan dan Lembaga Keuangan) dan praktisi agribisnis (petani/organisasi petani dan pengusaha). Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator berikut: (1) Terbentuknya jaringan kerja antara kelembagaan penyuluhan, Klinik Agribisnis, Organisasi Petani (KT/Gapoktan/Koperasi/Pengusaha), Badan/Dinas/Instansi Teknis dengan sumber teknologi (Puslit/BB/LRPI/Balit), (2) Terbentuknya Klinik agribisnis di setiap lokasi, dan (3) Adanya laboratorium lapangan agribisnis sebagai media diseminasi, penyuluhan, pelatihan, dan perencanaan pembangunan dan awal dari proses adopsi inovasi yang lebih luas.



Beberapa tindak lanjut kegiatan pada tahun 2008 adalah: (a) Peningkatan koordinasi pelaksana Prima Tani, terutama terkait dengan Penyeliaan, penyiapan dan penyampaian inovasi teknologi, serta operasional dan tata kerja pemandu teknologi, (b) Penyusunan konsep dan langkah-langkah internalisasi Prima Tani ke daerah dan *exit strategy* yang harus dilakukan, dan (c) Sinkronisasi Prima Tani dengan Program PUAP.

4.2 Kajian Kritis Kinerja Prima Tani: Konsep dan Implementasi

Dalam rangka penyempurnaan konsep dan implementasi Prima Tani, Badan Litbang Pertanian membentuk Tim Kritis, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberi masukan terhadap penajaman konsep dan

implementasi Prima Tani di lapangan. Kajian ini dilakukan oleh beberapa peneliti senior Badan Litbang Pertanian. Temuan utama dari hasil kajian ini antara lain :

Pada tataran konsep terlihat perlunya semua pihak terkait untuk menyamakan persepsi, untuk itu dialog yang mencerahkan sangat diperlukan dalam upaya menyempurnakan konsep yang ada. Sosialisasi Prima Tani kepada pejabat formal di berbagai tingkatan telah berhasil dengan baik, sehingga Prima Tani diterima sebagai bagian integral dari program pembangunan pertanian daerah, yang tercermin dari dukungan teknis (termasuk dana) dari pemerintah daerah. Prima Tani umumnya ditempatkan sebagai "*komponen pembuka*" yang didukung berbagai instansi terkait. Prima Tani juga diposisikan sebagai "*komponen pendukung*" program pemerintah daerah. Prima Tani telah diarahkan untuk dilaksanakan secara partisipatif, dengan melibatkan lembaga pemerintah dan masyarakat setempat. Namun demikian, kelanggengan partisipasi masih harus diuji, karena boleh jadi masih berupa efek uji-coba atau ikut-tokoh yang lazim terjadi pada suatu proyek rintisan.

Keragaman pelaksanaan Prima Tani di lapangan memerlukan upaya pemetaan pola dan strategi pendekatan, peta pencapaian Prima Tani, peta kondisi wilayah secara lintas aspek (peta agro-ekosistem, penyebaran teknologi, kelembagaan dan lain-lain) yang di *overlay*, guna memudahkan mencari titik temu berbagai elemen penentu keberhasilan program. Upaya pemetaan dan *super-imposed* peta terkait diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan pendorong (*driving forces*) yang diperlukan guna menyusun langkah dan strategi pengembangan Prima Tani ke depan.

Agar Prima Tani dapat berperan lebih optimal dalam percepatan diseminasi inovasi pertanian, diperlukan upaya penyederhanaan konsep/desain program. Prima Tani juga perlu dijadikan perekat program pembangunan nasional dan daerah. Selain itu perlu komunikasi yang lebih intensif di antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai penyelia Prima Tani, karena hasil kajian menunjukkan salah satu penyebab keragaman dalam implementasi Prima Tani di lapangan terkait dengan kualitas komunikasi para pelaksana.

Pelaksanaan Prima Tani ke depan harus dapat bersinergi dengan berbagai program sejenis yang ada di pedesaan, seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) maupun program lainnya. Terkait dengan pelaksanaan PUAP, Prima Tani dapat saja diposisikan sebagai *nucleus sites* yang mendukung dan memandu lokasi lain sebagai *satellite sites*.

4.3 Kajian Pembangunan Wilayah Pedesaan

Untuk melihat kinerja proses pembangunan ekonomi di pedesaan dapat dilihat dari indikator produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Indikator produksi dicerminkan dari profitabilitas usahatani, teknologi usahatani, dan efektifitas kebijakan harga pemerintah. Indikator kesejahteraan petani dicerminkan dari perkembangan struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani, serta nilai tukar faktor produksi (NTFP). Profitabilitas usahatani komoditas utama umumnya masih rendah karena teknologi yang diterapkan petani relatif masih sederhana dengan produksi belum maksimum.

Fluktuasi NTFP cukup signifikan di sebagian wilayah yaitu NTFP lebih tinggi dari NTFP nasional dan sebagian lebih rendah. Perkembangan upah non pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan upah pertanian. Rata-rata harga Urea di tingkat petani sekitar 4,17% – 66,67% diatas HET. Kondisi ini menunjukkan kebijakan subsidi pupuk yang diterapkan pemerintah tidak efektif untuk menekan harga pupuk di tingkat petani. Harga gabah (GKP) bervariasi menurut wilayah dan musim, namun demikian secara umum cenderung di atas HPP. Fenomena ini menunjukkan bahwa HPP yang ditetapkan pemerintah cukup efektif mengamankan harga gabah di tingkat petani.

Perbandingan antara total pendapatan petani dan pengeluaran rumah tangga petani contoh umumnya seimbang atau petani belum mampu melakukan *saving* untuk investasi, khususnya di sektor pertanian. Berdasarkan proporsinya, pengeluaran untuk pangan dan non pangan umumnya seimbang bahkan pada sebagian proporsi pengeluaran pangan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran non pangan. Untuk itu, kebijakan pembangunan pertanian yang berupaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani perlu terus diupayakan.

Pengkajian, Pendampingan, dan Monitoring Kelembagaan Keuangan Mikro

Keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) sangat penting dalam mendukung percepatan adopsi inovasi pertanian. Perkembangan LKM di Indonesia cukup pesat dan mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam meningkatkan kemampuan permodalan petani. Pengkajian, Pendampingan, dan Monitoring Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tahun 2007 bertujuan untuk mengidentifikasi indikator keberlanjutan LKM

Pertanian yang dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ada beberapa aspek penting terkait dengan keberadaan dan pengembangan LKM ke depan, yaitu LKM Pertanian dapat dijadikan alternatif instrumen kebijakan pemerintah untuk mendukung percepatan adopsi inovasi pertanian menuju peningkatan produktivitas usahatani, pendapatan, dan kesejahteraan rumah tangga petani. Skim LKM Pertanian yang relevan dikembangkan adalah pola Bukan Bank Bukan Koperasi (B3K) yang partisipatif dan akomodatif terhadap karakteristik petani dan usahatani, sehingga semua petani lebih mudah mengakses. Salah satu kendala pengembangan LKM Pertanian pola B3K adalah terkait dengan aspek kelembagaan dan kemampuan operasionalnya yang relatif rendah, sehingga kunci keberlanjutan pengembangan LKM Pertanian terletak pada dukungan perangkat hukum yang memadai, dukungan kapabilitas pengelola LKM yang kuat; kemampuan pemupukan modal dan *seed capital* serta dukungan persepsi dan apresiasi nasabah yang positif terhadap LKM.

Dalam menumbuhkan LKM Pertanian, sebaiknya diawali dengan penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan permodalan usaha tani, berbasis kelompok/gabungan kelompok tani, sosialisasi dan advokasi, fasilitasi dan penguatan modal serta dilanjutkan sampai monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk mengembangkan LKM Pertanian yang sudah ada diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu melakukan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, mobilisasi tabungan masyarakat sebagai basis sistem kekuatan LKM, membangun kapasitas LKM melalui inisiasi kerja sama dengan dunia usaha, serta perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola LKM.

Rancang Bangun Pembangunan Pertanian Provinsi NTT

Potensi ekonomi Provinsi NTT yang mengandalkan sumber daya alam belum dapat berkembang dengan baik. Pelaku ekonomi di usahatani pada umumnya adalah petani dan peternak kecil yang tidak akses terhadap pasar. Situasi petani dan peternak semakin sulit karena struktur ekonomi belum terdiversifikasi dengan baik sehingga hubungan fungsional antar sektor ekonomi belum terjalin dengan baik.

Kendala lain adalah pemberdayaan ekonomi rakyat belum dibarengi dengan rekayasa sosial budaya (*socio-cultural engineering*) untuk merubah *inner life* dan mengkondisikan tatanan masyarakat yang akomodatif terhadap tuntutan pasar untuk maju. Keterbatasan sumberdaya lahan dan

air merupakan simpul kritis yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Lahan pertanian potensial di luar wilayah kawasan hutan seluas 2,67 juta ha terdiri dari 93,43% lahan kering pemanfaatannya masih relatif rendah dan sisanya 6,57% (174,8 ribu ha) adalah lahan sawah.

Dukungan infrastruktur dan aksesibilitasnya masih terbatas khususnya infrastruktur jalan yang didominasi jalan tanah. Untuk sarana transportasi lainnya, keberadaan pelabuhan laut dan udara menjadi penting mengingat terpecarnya wilayah provinsi pada 42 buah pulau.

Sebagian besar penduduk (73,66%) menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pola penggunaan lahan mencerminkan pola budaya agro-pastoral. Pola ini merupakan salah satu cara menjamin ketersediaan pangan (*food security*) secara berlapis untuk menghadapi kondisi lingkungan fisik yang kurang bersahabat bagi usaha pertanian.

Kelembagaan lokal yang dapat difungsikan atau dikembangkan dalam kegiatan pertanian antara lain: (a) *Local leaders* (toga, toma), (b) *Rencak* (pengolahan lahan dengan ternak), (c) *Tofa* (penebasan gulma secara komunal), (d) *Rae maten* (tanah mati), (d) *Hakawah* (gotong royong), serta (e) *Tokoh adat dan local leaders* (dato, makleat).

Beberapa hambatan dalam pengembangan kelembagaan antara lain: (1) Rasionalitas ekonomis belum membudaya, (2) Pengetahuan budidaya tanaman masih rendah, (3) Harga produk sangat rendah, (4) Keterampilan mengelola UPH, koperasi lemah, (5) Lemahnya kepemimpinan, dinamika, dan manajemen kelompok tani, (6) Permodalan lemah, (7) Kesadaran petani akan manfaat hidup berkelompok rendah, (8) Menurunnya peranan penyuluh, (9) Lembaga asosiasi tidak berfungsi, dan (10) Terbatasnya penangkar benih.

Beberapa kebijakan dan program yang dapat dikembangkan untuk pembangunan pertanian di Provinsi NTT adalah: (1) Peningkatan Dukungan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, (2) Pemanfaatan Sumberdaya Lahan, (3) Pemanfaatan Sumber Daya Air, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Sumber Daya Pertanian Lainnya, (6) Pengembangan Kelembagaan Pertanian, (7) Penyediaan Insentif Investasi, (8) Pengembangan Agroindustri Pedesaan dan Pemasaran, dan (9) Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Diseminasi Teknologi Pertanian

Pemanfaatan teknologi ini khususnya yang berkaitan dengan akses internet memberikan peluang besar bagi setiap orang untuk mengakses berbagai sumber informasi secara cepat, bebas hambatan, relatif murah, dan mudah. Melalui media tercetak BBP2TP dapat menginformasikan bahan pengembangan pertanian kepada pengguna, sedangkan melalui forum media ekspose dan pameran, pengguna informasi dapat secara langsung berkomunikasi tentang permasalahan pertanian, khususnya yang terkait dengan teknologi.



Publikasi media informasi tercetak yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2007 meliputi: Laporan Tahunan 2006 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian; Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian; Prosiding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian mendukung Pembangunan Berawal dari Desa; Buku Kerja BB Pengkajian; Booklet Mari Membangun Desa dengan Prima Tani.

Pengembangan dan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi informasi BBP2TP melalui jaringan LAN yang dioperasikan terpadu dengan jaringan cyber cimanggu yang tersambung dengan 6 UPT/UK Litbang di Kampus Penelitian Cimanggu (kecuali Puslitbang Tanaman Pangan) menggunakan sistim jaringan fiber optic. Website BBP2TP dirancang lebih dinamis dengan hosting servernya di Badan Litbang Pertanian. Untuk proses updatingnya dapat dilakukan secara remote menggunakan soft ware Win Scp. Keberadaan jaringan LAN ini sangat membantu kegiatan Peneliti maupun untuk keperluan manajemen dan administrasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan data informasi maupun komunikasi, khususnya email.

Kegiatan pameran/ekspose yang dapat diikuti pada TA 2007 antara lain Agrinex Expo, Penas PNI XII di Sembawa, Sumatera Selatan, dan Pameran Pekan Agro Inovasi II di Bogor.



Kegiatan penyebaran informasi pertanian juga dilakukan secara audensi melalui siaran radio pertanian dan televisi yang disiarkan secara langsung dan dikemas dengan dialog interaktif. Materi siaran radio diarahkan untuk materi yang bersifat teknis aplikatif teknologi pertanian, sedangkan untuk siaran televisi dipilih materi yang bersifat informasi kebijakan seperti pengembangan Prima Tani dan PUAP. Siaran radio

pertanian dilakukan sebanyak 7 kali dan televisi 2 kali.

Pengembangan layanan perpustakaan BBP2TP dilakukan melalui pembenahan koleksi bahan pustaka dengan pembukuan dan penomoran sesuai katalog pustaka, serta entry data menggunakan Win Isis.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan jumlah staf yang

berkompeten serta fasilitas untuk pengelolaan teknologi informasi khususnya untuk jaringan informasi berbasis web dan perancangan multimedia sistem komputerisasi. Ketersediaan peralatan, sumberdaya dan dukungan manajemen sangat diperlukan dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

Kajian Dampak Kegiatan Diseminasi Inovasi Luaran BPTP

Salah satu fungsi dari BBP2TP adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Sejalan dengan fungsi tersebut dan terkait dengan kegiatan diseminasi yang dilakukan BPTP, maka diperlukan adanya suatu acuan secara umum tentang proses kegiatan diseminasi yang akan dilakukan BPTP serta acuan untuk menilai tingkat keberhasilan dari proses diseminasi itu sendiri. Hal ini menjadi penting mengingat semakin besarnya tuntutan terhadap kejelasan tolak ukur kinerja BPTP terkait dengan pemanfaatan hasil kajian yang dilakukan BPTP sendiri.

Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis kegiatan diseminasi yang dilaksanakan BPTP masih bervariasi antar BPTP. Selama 5 tahun terakhir BPTP melakukan kegiatan diseminasi antara 4–17 ragam jenis kegiatan diseminasi. Dalam proses perencanaannya, identifikasi kelompok sasaran perlu adanya perbaikan.

Bertitik tolak dari kenyataan di atas maka diperlukan adanya panduan untuk merencanakan kegiatan diseminasi dengan baik, seperti penetapan kelompok sasaran yang dipilah secara tegas. Selain itu, diperlukan pedoman dalam membuat batasan yang jelas dari setiap kelompok sasaran baik penyebaran informasi, uji coba teknologi, maupun pemasyarakatan teknologi.

Beberapa persoalan dalam proses pelaksanaan diseminasi adalah terbatasnya ketersediaan tenaga terampil dalam menyiapkan bahan diseminasi *hasil pengkajian* menjadi modul-modul yang mudah dipahami oleh kelompok sasaran yang berbeda. Keterlibatan secara langsung Balit/Puslit/BB dalam melakukan sosialisasi ke BPTP tanpa melihat kesiapan tenaga pengkaji/penyuluh BPTP, telah menyebabkan besarnya ketergantungan para pengkaji



terhadap Balit/Puslit/BB. BBP2TP perlu lebih berperan dalam menjembatani BPTP dengan Balit/Puslit/BB, terutama dalam proses transfer teknologi dan penyiapan bahan diseminasi. Terutama terkait dengan pengembangan SDM.



Terkait dengan materi diseminasi perlu ada standarisasi bahan diseminasi dengan melibatkan sumber teknologi dan pihak-pihak yang terkait dengan diseminasi (badan SDM). Perlu pelatihan yang terencana dan sistematis

bagi peningkatan kemampuan penyuluh dalam menyiapkan bahan diseminasi. Secara bertahap perlu dikembangkan akreditasi tenaga penyuluh di BPTP, sehingga persyaratan minimal sebagai pihak yang menyiapkan bahan dan menyampaikan bahan diseminasi pada kelompok sasaran dapat dipenuhi.

Salah satu persoalan dalam upaya membangun suatu sistem inovasi di pedesaan adalah tidak berfungsinya jejaring penyuluh pada beberapa tingkatan dengan BPTP sebagai medium dalam transfer teknologi. BPTP belum secara baik merangkul penyuluh dalam berbagai tingkatan, dalam beberapa kasus BPTP dianggap sebagai saingan. Melalui *FEATI Project* kesempatan untuk membangun jejaring pada berbagai tingkatan dan mengkondisikan munculnya penyuluh-penyuluh swakarsa dari berbagai kalangan yang dapat menjadi patner BPTP ke depan. Melalui kegiatan FEATI, BPTP harus dapat membuat perencanaan kegiatan diseminasi dengan lebih baik dan mulai menyusun indikator keberhasilan secara kuantitatif dan meningkatkan kemampuan penyuluh yang ada di BPTP dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan diseminasi.

Peningkatan Kapabilitas Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian

Kegiatan yang dilakukan selama TA. 2007, yaitu: (a) Kegiatan Workshop Penyusunan Program Pengkajian dan Diseminasi BPTP TA. 2008, (b) Penyusunan Panduan RPTP/RDHP, Monev, Penulisan Artikel Ilmiah, dan (c) Pertemuan Regional BPTP TA. 2007. Ringkasan dari masing-masing kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. *Workshop Penyusunan Program Pengkajian dan Diseminasi BPTP TA. 2007*

Workshop Penyusunan Program Pengkajian dan Diseminasi merupakan salah satu kegiatan rutin dalam tahapan perencanaan pengkajian dan diseminasi lingkup BPTP. Agenda workshop mencakup beberapa materi, antara lain: Anggaran Berbasis Kinerja, Simpul Kritis Pelaksanaan Prima Tani, Monitoring dan Evaluasi (Waskat) kegiatan Pengkajian dan Diseminasi, Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), Perspektif Pengkajian Jarak Pagar di BPTP, Sosialisasi Revisi Permentan No 1/2006 dan Transfer Pengetahuan (Metode *Quick Assessment* Sumberdaya Lahan), dan Penajaman Matrik Program 2008.

Beberapa hal yang terangkat dalam workshop antara lain: Masih terdapat kerancuan dalam penyusunan matrik antara indikator output dan output. Output sebagian besar masih dinyatakan secara kualitatif dan kurang tegas. Output kegiatan Prima Tani di BPTP yang banyak iokasinya perlu disajikan secara spesifik sesuai kondisi di masing-masing lokasi. Tahapan pencapaian output akhir dalam suatu kegiatan (output antara) sebagian belum disajikan dengan baik. Terdapat beberapa judul kegiatan yang di luar Tupoksi BPTP, misalnya melakukan penelitian teknologi dasar yang merupakan Tupoksi Balit/BK Komoditas. Sebagian judul kegiatan belum menyatakan keterkaitan institusi yang kompeten dalam pengkajian/diseminasi dengan baik.

2. Penyusunan Panduan RPTP/RDHP, Monev, dan Penulisan Artikel Ilmiah

Ada tiga bahan dari Tim Teknis Pengembangan yang disampaikan dalam pertemuan regional, yaitu: (1) Sosialisasi panduan RPTP/RDHP, (2) Sosialisasi Monev, dan (3) Sosialisasi penulisan artikel ilmiah. Namun sosialisasi penulisan artikel ilmiah hanya disampaikan secara umum, sedangkan secara mendetail termasuk prakteknya dilakukan melalui pendampingan ke masing-masing BPTP secara bertahap. Mengingat pendampingan ini belum bisa dilakukan pada TA. 2007, maka diharapkan pada TA. 2008 kegiatan ini dapat dilakukan secara baik pada beberapa BPTP terpilih.

3. Pertemuan Regional BPTP TA. 2007

Dalam upaya melakukan perbaikan kinerja dan manajemen internal BPTP serta merumuskan langkah operasional yang perlu diambil untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan ke depan, pada tanggal 21–23 Mei 2007 telah diadakan pertemuan regional BPTP wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua di Hotel Santika Manado dan pada tanggal 27–29 Mei 2007 dilanjutkan dengan pertemuan regional BPTP wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Holidays Resort, Senggigi Beach. Pertemuan Regional wilayah Sumatera diadakan pada tanggal 5–7 Juni 2007 di Hotel Garuda Plaza Medan dan terakhir diadakan pada tanggal 10–12 Juni 2007 di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Materi yang disampaikan dalam keempat pertemuan tersebut meliputi: (1) Sosialisasi manajemen internal BPTP, (2) Sosialisasi panduan panduan umum pembuatan RPTP/RDHP, (3) Sosialisasi panduan umum monitoring dan evaluasi, (4) Sosialisasi panduan umum penulisan artikel ilmiah, (5) Sosialisasi manajemen pengelolaan kebun percobaan



dan Laboratorium Diseminasi BPTP, (6) Sosialisasi petunjuk pelaksanaan seminar nasional, (7) Penyelesaian kasus-kasus spesifik tentang kepegawaian, keuangan, dan asset negara, dan (8) Perkembangan pelaksanaan Prima Tani di beberapa lokasi.

Beberapa hasil Regional Workshop antara lain: dalam percepatan adopsi teknologi ke pengguna, salah satunya dapat dilakukan dengan sesering mungkin mengadakan acara *open house*. Dengan demikian BPTP harus lebih proaktif dan agresif dalam mendiseminasikan teknologi yang dihasilkannya.

Masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam perbaikan kinerja BPTP ke depan.

Melalui peningkatan komunikasi baik di BPTP masing-masing, maupun antar BPTP serta dengan BBP2TP diyakini dapat mengurangi permasalahan tersebut. Hasil kesepakatan dalam pertemuan regional dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya perbaikan kinerja BPTP kedepan.

Peningkatan Kapasitas Manajemen SDM, Fasilitas, dan Sarana

Salah satu penyelenggaraan fungsi BBP2TP adalah mengelola Tata Usaha dan Rumah Tangga yang meliputi tata administrasi kepegawaian seluruh BPTP, yang diwujudkan dalam kegiatan "Pembinaan Peningkatan Kapasitas Manajemen SDM, Fasilitas, dan Sarana". Tujuan utamanya adalah penguatan strategi dalam pencapaian misi dan visi organisasi serta peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumberdaya manusia dan seluruh asset yang terkait di dalamnya.

Bidang pokok yang dilaksanakan dalam kegiatan meliputi beberapa hal. Bidang Kelembagaan: finalisasi BPTP Papua Barat dan inisiasi pembentukan satker sementara Sulawesi Barat. Bidang Manajemen SDM: Peningkatan kapasitas SDM dan Penataan Kepegawaian BPTP; Peningkatan kapasitas manajemen Sumberdaya manusia dilakukan melalui kegiatan yang terprogram dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut antara lain:

- (1) Perencanaan dan pengembangan pegawai
- (2) Mutasi Kepegawaian
- (3) Administrasi jabatan fungsional

Asset, fasilitas, dan sarana: Pengelolaan Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) secara tersurat menjadi tanggung jawab instansi baik itu barang-barang yang didapatkan melalui pengadaan barang, hibah, atau pembelian terutama yang melalui anggaran rutin serta anggaran pembangunan BBP2TP. Opname fisik perlu dilaksanakan secara berkala, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan tingkat pemanfaatan barang milik negara.

Kegiatan di atas secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pembentukan lembaga-lembaga penelitian di provinsi baru membuktikan bahwa lembaga pengkajian dan penelitian sangat diperlukan oleh pemerintah daerah. Peningkatan kompetensi tenaga administrasi, tenaga fungsional dan tenaga penunjang lainnya melalui pelatihan jangka panjang dan jangka pendek menghasilkan pelayanan dan kinerja pegawai yang lebih optimal. Pelayanan dalam bidang administrasi dirasakan mengalami perubahan dan akselerasi yang cukup signifikan sehingga pelayanan terhadap para stakeholder lebih maksimal, selain itu output yang dihasilkan dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian terus meningkat. Demikian pula penataan asset, sarana dan fasilitas, dalam pengelolaan dan penggunaannya secara bertahap menjadi lebih efektif dan efisien.

V. SUMBERDAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia yang dimiliki BBP2TP memegang peran yang strategis dalam mendukung kinerja BBP2TP. Perencanaan, pembinaan, dan pengembangan SDM di BBP2TP dan kegiatan pendukungnya akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap perbaikan potensi, kinerja, dan dorongan untuk terus berprestasi serta mengembangkan diri. Keberhasilan pengembangan SDM ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pelaksanaan program litkaji dan diseminasi, serta akuntabilitas institusi. Total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BBP2TP tahun 2007 sebanyak 80 orang, dimana Peneliti 26 orang, Penyuluh 5 orang, dan tenaga penunjang 46 orang. Sedangkan jumlah SDM BPTP di 32 propinsi yang dikoordinasikan BBP2TP berjumlah 2744 orang dengan perincian Peneliti 815 orang, Penyuluh 267 orang, Litkayasa 170 orang, Fungsional lainnya 45 orang dan staf penunjang 1180 orang.

SDM yang bertugas di BBP2TP ini belum sepenuhnya dapat menggerakkan kegiatan dengan baik. Hal itu karena kurangnya ketrampilan dalam melaksanakan beberapa fungsi koordinasi, serta menumpuknya tenaga penunjang pada tenaga non terampil. Diperlukan pelatihan yang sistematis bagi peningkatan kapasitas SDM.

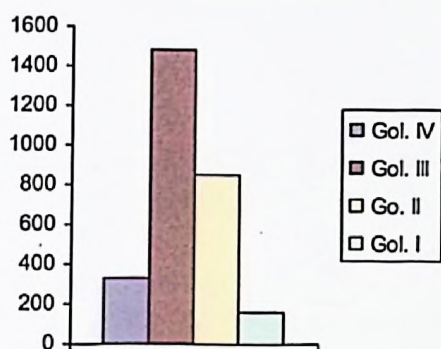


Diagram 1. Keragaan Pegawai Lingkup BBP2TP berdasarkan Golongan

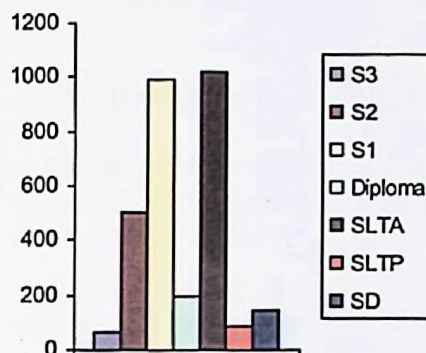


Diagram 2. Keragaan Pegawai BBP2TP berdasarkan Tingkat Pendidikan

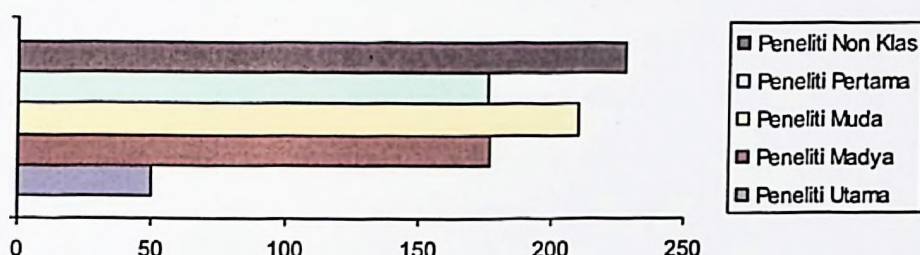


Diagram 3. Keragaan Fungsional Peneliti Lingkup BBP2TP

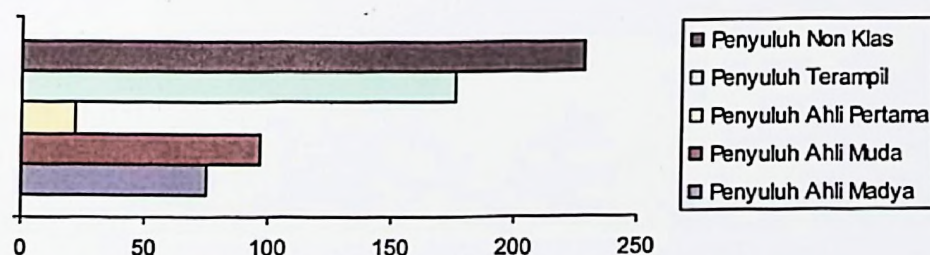


Diagram 4. Keragaan Fungsional Penyuluh Lingkup BBP2TP

VI. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka keperluan pelaksanaan kegiatan operasional, BBP2TP memerlukan dukungan sarana dan prasarana (safas) yang memadai, baik dalam barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak.

6.1. Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan gedung kantor. Total barang tidak bergerak pada TA. 2007 sebanyak 12 unit dengan total nilai sebesar Rp 5,466 milyar (Tabel 6.1).

Tabel 6. 1. Rekapitulasi Barang Inventaris Tidak Bergerak BBP2TP TA. 2007

No.	Jenis	Jumlah
1.	Luas Tanah	8.896 m ²
2.	Luas Taman	310 m ²
	a. Luas Taman Tahun 2003	100 m ²
	b. Luas Taman Tahun 2007	210 m ²
3	Bangunan	3.347 m ²
	a. Gedung A (Gedung lama)	1.176 m ²
	b. Gedung B (Gedung keuangan&garasi)	322 m ²
	c. Gedung C (Ex. Lab Hama)	962 m ²
	d. Gedung D (Gedung baru)	631 m ²
	e. Gedung <i>Guest House</i>	243 m ²
	f. Gedung Pos Satpam	18 m ²
4.	Halaman	5.221 m ²

6.2. Barang Bergerak

Keadaan inventaris barang bergerak dibedakan menjadi barang inventaris alat angkutan dan barang inventaris peralatan kantor. Untuk barang inventaris alat angkutan, pada periode tahun 2007 BBP2TP mempunyai kendaraan roda-4 sebanyak 8 unit dengan total nilai sebesar Rp.1,295 milyar dan kendaraan roda-2 sebanyak 9 unit dengan total nilai sebesar Rp.93,038 juta (Tabel 6.2).

Tabel 6. 2. Keragaan Barang Inventaris Bergerak Alat Angkutan, 2007

No.	Uraian	Jenis kendaraan	Jumlah
1.	Kendaraan Roda- 4	▪ Toyota Kijang Minibus ▪ Mitsubishi/Kuda ▪ Suzuki Jeep	5 unit 2 unit 1 unit
2.	Kendaraan Roda- 2	▪ Yamaha Vega DB ▪ Suzuki A 100 ▪ Honda Grand Astrea ▪ Honda Supra X 125 Disk ▪ Honda Astrea ▪ Suzuki Thunder 125 ▪ Suzuki Shogun 125 RR	1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Sedangkan barang inventaris bergerak peralatan kantor yang ada di BBP2TP terdiri dari 81 jenis barang, dimana jumlah masing-masing jenis barang bergerak sangat bervariasi.



VII. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BBP2TP berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA tahun 2007) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Realisasi anggaran pada TA. 2007 mencapai 74,32% dengan rincian realisasi belanja pegawai mencapai 84,05% (Rp 3,547 milyar), realisasi belanja barang mencapai 59,85% (Rp 4,626 milyar), dan realisasi anggaran belanja modal sebesar 88,11% (Rp 4,510 milyar) seperti pada Tabel 7.1.

Secara rinci realisasi anggaran Satker BBP2TP tahun anggaran 2007 ditampilkan pada Lampiran 1.

Tabel 7. 1. Realisasi Anggaran BBP2TP Tahun 2007 Berdasarkan Belanja, 2007

Jenis Belanja	Pagu T.A 2007 (Rp. 000,-)	Realisasi s/d Des 2007		Sisa Anggaran	
		(Rp. 000,-)	(%)	(Rp. 000,-)	(%)
Belanja Pegawai	4.221.027	3.547.608,703	84,05	673.418,297	15,95
Belanja Barang	7.727.349	4.626.434,009	59,87	3.100.914,991	40,13
Belanja Modal	5.118.895	4.510.044,660	88,11	608.850,340	11,89
Total	17.067.271	12.684.087,372	74,32	4.383.183,628	25,68

VIII. PENUTUP

Secara umum pada TA. 2007 BBP2TP telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik, baik fungsi koordinasi dan pembinaan di BPTP maupun melaksanakan kegiatan pengkajian dan diseminasi. Namun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja akan terus dilakukan terutama terkait dengan sinkronisasi dan sinergi di intern BBP2TP maupun BPTP melalui forum-forum pertemuan dan koordinasi yang lebih intensif. Selain itu perbaikan perencanaan kegiatan akan terus ditingkatkan sehingga implementasi kegiatan dapat terlaksana dengan lebih baik.

Lampiran 1. Realisasi DIPA Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian T A. 2007

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, MAK	Sumber Dana	Pagu Anggaran DIPA (Rp.000,-)	Realisasi (Rp. 000,-)	% Terhadap DIPA	Sisa Anggaran (Rp. 000,-)
03.03 . Program Pengembangan Agribisnis					
1515. Pengembangan Sumberdaya Informasi IPTEK, Diseminasi dan Penjaringan Umpan Balik					
0002. Administrasi Kegiatan	RM	538.739	485.716,48	90,16	53.022,52
0026. Poliklinik/Obat-obatan+dokter	RM	30.000	29.953,50	99,85	46,50
0051. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program	RM	1.863.620	1.279.334,45	68,65	584.285,55
0084. Evaluasi/Laporan Kegiatan	RM	273.600	174.530,10	63,79	99.070
0162. Pembangunan Gedung Kantor	RM	2.390.549	2.261.008,66	94,58	129.540,34
0167. Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung	RM	453.250	421.499	92,99	31.751
0272. Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung	RM	346.136	324.390	93,72	21.746
0273. Pengadaan meubelair	RM	283.750	249.850	88,05	33.900
0277. Pengadaan Alat Pengolah Data	RM	355.200	337.150	94,92	18.050
0287. Pengadaan Alat Studio & Komunikasi	RM	244.451	228.410	93,44	16.041
0289. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2	RM	30.000	28.600	95,33	1.400
0290. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4	RM	212.414	211.735,5	99,68	678,50
0323. Teknologi Pengembangan Agribisnis Pertanian Terpadu	RM	744.600	469.160,25	63,01	275.439,75
0465. Penelitian dan Pengemb. Sosek dan Kebijakan Pertanian	RM	288.140	191.519,70	66,47	96.620,30
0470. Pengembangan Sumberdaya Informasi IPTEK,	RM	2.364.047	1.707.101,20	72,21	656.945,80
0474. Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi	RM	6.800	0	0,00	6.800,00
0748. Pengembangan Jaringan Internet	RM	99.000	79.200	80,00	19.800,00
1138. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10	RM	104.000	98.987,036	95,18	5.012,96
1139. Rehabilitasi Gedung	RM	282.250	261.750	92,74	20.500,00
2005. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	RM	16.800	16.271	96,85	529,00
Jumlah Program 03.03.1515		10.927.346	8.856.167	81,05	2.071.179
03.04 . Program Peningkatan Ketahanan Pangan					
0090. Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Publ.					
0009. Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan (KPPN. 0230/02.52/Reg.10754001)	RK	49.381	19.036	38,55	30.345
	RMP	13.580	5.234,90	38,55	8.345,10
0273. Pengadaan meubelair	RK	36.363	0	0	36.363
	RMP	10.000	0	0	10.000
0277. Pengadaan Alat Pengolah Data	RK	104.835	103.424	98,65	1.411
	RMP	28.830	28.441,60	98,65	388,40

Lampiran 2. Lanjutan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, MAK	Sumber Dana	Pagu Anggaran DIPA (Rp.000,-)	Realisasi (Rp. 000,-)	% Terhadap DIPA	Sisa Anggaran (Rp. 000,-)
0289. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2	RMP	30.000	29.515,00	98,38	485,00
0470. Pengembangan Sumberdaya Infomasi IPTEK, Diseminasi & Jaringan Umpan Balik	RK	1.508.013	391.577	25,97	1.116.436,414
1285. Peningkatan Diseminasi Teknologi&Spesifik Lokasi (KPPN.0230/02.52/Reg. 10754001)	RMP	394.014	103.251	26,21	290.762,540
	RK	452.798	74.147,345	16,38	378.650,655
2005. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (KPPN.0230/02.52/Reg.10754001)	RMP	119.789	19.458,05	16,24	100.330,950
	RK	2.181	0	0	2.181
	RMP	600	0	0	600
2593. Pengadaan Peralatan TI (KPPN.0230/02/52/Reg.10754001)	RK	207.982	0	0	207.982
	RMP	39.924	0	0	39.924
Jumlah 03.04.0090	RK	2.361.553	588.183,931	24,91	1.773.369,069
	RMP	636.737	185.901,01	29,20	450.835,99
90.19. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan					
0001. Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan					
0001. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vakasi	RM	2.534.957	2.459.635	97,03	75.321,797
0002. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran					
0032. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	RM	17.550	17.160	97,78	390
0034. Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/ Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga teknis lainnya	RM	1.800	1.770	98,33	30
0926. Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK) Barang cetak, Alat RT, Langganan Majalah)	RM	41.730	41.629	99,76	100,90
2007. Langganan Daya dan Jasa	RM	303.600	303.144,252	99,85	455,748
0003. Perawatan Gedung Kantor/Khusus					
0205. Perawatan Gedung Kantor	RM	158.278	157.782	99,69	496
0004. Perawatan Sarana dan Prasaran Kantor					
0256. Perbaikan Peralatan Kantor	RM	51.070	45.584	89,26	5.486,5
2006. Perawatan Sarana Gedung	RM	32.650	27.131,50	83,10	5.518,5
Jumlah Program 90.19		3.141.635	3.053.835,555	97,21	87.799,445
Jumlah	RM	14.068.981	11.910.002,43	84,65	2.158.978,57
	RK	2.361.553	588.183,931	24,91	1.773.369,07
	RMP	636.737	185.901,01	29,20	450.835,99
Total		17.067.271	12.684.087,372	74,32	4.383.183,628



Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Jl. Tentara Pelajar No. 10 Bogor 16114

Telp. 0251-8351277 Fax. 0251-350928

<http://www.bbp2tp.litbang.deptan.go.id>

E-mail: bbp2tp@litbang.deptan.go.id, bbp2tp@yahoo.com